



Politeia : Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 4 No. 2 Tahun 2021

Doi : 10.21043/politeia.v4i2.11735

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politeia>

Wacana Poros Partai Islam untuk PILPRES 2024: Politik Identitas atau Penggalangan Suara Kritis?

Daniel Rusyad Hamdanny, Khoiruddin Mukhtar

Pascasarjana KPI UIN SGD Bandung

danielhamdanny@gmail.com, khoiruddin@uinsgd.ac.id

Abstract

Amidst the increasing societal polarization, after the 2014 and 2019 Indonesia's presidential elections, identity politics has been reintroduced by Islamic political parties. The discourse on the Islamic political axis sprang due to the fact that the incumbent was constitutionally unable to run again as a presidential candidate. The level of public trust toward the executive is continuously declining, along with the strengthening of critical voices that have been ignored by the Government. From the internal side, various surveys favoring some Islamic political figures stimulated the realization of the Islamic political axis to win the 2024 contestation. This study seeks to discuss the attitudes of Islamic party elites towards Islamic political axis for the 2024 election, using content analysis methods toward various literature sources; books, journals, survey reports, conference proceeding as well as news articles on the discourse of the Islamic Party Axis Coalition. The study used the Barth, Haller dan Punsher's theory of identity and Lijphart and Riker's political coalition as theoretical basis. The Islamic political axis as identity politics is more appropriate to be seen as an effort to build the collective awareness of the ummah to rise up, synergize, and fight for justice through the political system, instead of striving towards the formalization of Islam. The difference in the attitude of the political party elites towards the discourse of the Islamic party axis - in the form of support, rejection and skepticism - eventually depends on the perspective of the elite in positioning identity politics and political Islam against socio-political map of Indonesia today. In fact, rejecting the idea of identity politics due to diversity reason is just the same as denying diversity itself. Especially, when the government is perceived to be incapable of making Indonesia to be "a shared home" for its entire citizens, the Islamic Party Axis Coalition can act as solidarity maker for consolidating Indonesia.

Keywords: Islamic Party Axis Coalition; political identity; 2024 presidential election

Abstrak

Di tengah polarisasi masyarakat yang semakin tajam pasca pilpres 2014 dan 2019, isu politik identitas kembali digulirkan partai politik Islam. Wacana poros Islam mencuat diantaranya disebabkan petahana yang secara konstitusi tidak dapat maju kembali sebagai capres. Tingkat kepercayaan publik terhadap eksekutif yang menurun, seiring menguatnya suara kritis yang selama ini cenderung diabaikan. Dari internal umat, tokoh-tokoh politik Islam yang diunggulkan berbagai survei semakin menstimulasi terwujudnya wacana koalisi poros Islam untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Penelitian ini berupaya membahas sikap elit parpol Islam terhadap wacana Poros Islam pada Pilpres 2024 menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai sumber literatur; buku, jurnal ilmiah, rilis hasil survei, artikel prosiding konferensi, serta karya jurnalistik mengenai koalisi Poros Partai Islam, ditinjau dari teori politik identitas Barth, Haller dan Punsher dan teori koalisi partai politik Lijphart dan Riker. Bahwa poros partai Islam sebagai politik identitas lebih tepat dipahami sebagai upaya membangun kesadaran kolektif umat untuk bangkit, bersinergi memperjuangkan keadilan melalui sistem politik, alih-alih perjuangan identitas menuju formalisasi Islam. Perbedaan sikap elit terhadap wacana poros partai Islam -berupa dukungan, penolakan dan skeptisisme- merefleksikan perspektif elit terhadap politik identitas, Islam politik dan peta sosial-politik hari ini. Sejatinya menolak gagasan koalisi parpol berbasis identitas dengan alasan

kebhinekaan, sama halnya dengan mengingkari kebhinekaan itu sendiri. Terlebih, ketika Pemerintah dipandang tidak cakap merawat Indonesia sebagai “rumah besar” milik bersama, Koalisi Poros Partai Islam sejatinya dapat menjadi pintu masuk untuk merajut kembali persatuan, menghimpun kekuatan menuju Indonesia yang lebih baik.

Kata kunci: Koalisi Poros Partai Islam; Politik identitas; Pilpres 2024

Pendahuluan (Introduction)

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, sebagaimana hasil riset Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 5 Mei 2021, berada pada kisaran angka 63,1 persen, dengan penilaian kinerja presiden dan wakil presiden mencapai angka 6 dari skala 1-10. Angka tersebut menurun cukup signifikan dari tingkat kepuasan public periode pertama pemerintahan Jokowi sebesar 77,2 persen (data Alvora Research Center per Januari 2015). Penilaian publik terhadap *performance* lembaga pemerintahan secara umum juga hampir sama. Tingkat kepuasan publik terhadap partai politik berkisar pada 53,3 persen, DPR di angka 55,2 persen, dan DPRD pada angka 59,5 persen.

Angka kepuasan publik hari ini bagi petahana bukan segalanya, mengingat rezim Jokowi telah memasuki periode kedua sehingga tidak dapat maju kembali pada pilpres 2024. Terlebih roda pemerintahan bergulir di atas siklus pandemi covid-19, sehingga banyak kebijakan tidak populis yang berorientasi pada penyelamatan jiwa dan pemulihan ekonomi ditempuh, seperti kebijakan PSBB/PPKM, pembatasan kegiatan, pengurangan hari libur nasional, peniadaan mudik, penyesuaian tunjangan ASN hingga wacana penerapan pajak pada sembako, persalinan dan pendidikan.

Bahkan sebelum covid 19 mewabah, kebijakan pemerintah yang banyak disoroti publik adalah penambahan utang luar negeri yang meningkat 150% dalam kurun 5-6 tahun. Total utang negara, termasuk BUMN per Juni 2021 mencapai Rp8.504 triliun. Didik J. Rachbini, peneliti senior INDEF memprediksi di akhir periode Jokowi, pemerintahan akan mewariskan lebih dari Rp10.000 triliun kepada presiden berikutnya,” ungkap Rachbini melalui keterangan pers (bisnis.tempo, 2021).

10 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar (per Desember 2019)

No	Negara	Utang LN*	Pendapatan* (APBN)	ULN/Revenue
1	RRC	2,100	3,622	58%
2	Brazil	569.39	382.44	149%
3	India	560.03	468.74	119%
4	Rusia	490.72	468.65	105%
5	Meksiko	469.72	254.26	185%
6	Turki	440.78	188.26	234%
7	Indonesia	402.72	128.55	313%
8	Argentina	279.30	126.41	221%
9	Afrika Selatan	188.10	76.30	247%
10	Thailand	180.23	107.05	168%

*) dalam miliar USD

Sumber: Debt Statistics 2021, CIA Fact Book dan Kompas.com

Tabel 1. Besaran Utang Luar Negeri Negara Debitor Terbesar berbanding Pendapatan Tahunan

Aspek lain yang banyak disoroti adalah penegakan hukum yang terkesan tebang pilih dan sikap anti-kritik pemerintah. Herlambang Wiratraman, pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga memandang bahwa kualitas demokrasi Indonesia di bawah rezim Joko Widodo mengalami penurunan, salah satunya tampak pada minimnya suara-suara kritis dari kampus. Herlambang berpendapat bahwa kondisi Indonesia mengarah menuju otoritarianisme sebagai konsekuensi dari apa yang disebut oleh Edward Aspinall sebagai regresi demokrasi. M. Nasir Djamil, anggota DPR RI dari Fraksi PKS menilai sektor penegakan hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak berjalan dengan baik. Presiden Jokowi telah gagal mewujudkan keamanan dan ketenangan dalam bidang tersebut (Dpr.go.id, 2019).

Aspek hukum dan keamanan dipersepsi paling buruk berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO). Penilaian tersebut ditengarai kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin yang dianggap lemah pada upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan survei IPO, 56 persen responden menyatakan kinerja di bidang hukum buruk, 8 persen diantaranya menilai sangat buruk. Hanya 29 persen yang memberi penilaian moderat atau cukup baik. Persepsi buruk masyarakat terhadap potret supremasi hukum dipantik oleh korupsi yang semakin menguat, bahkan tak jarang melibatkan oknum aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan aparat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Survei diikuti oleh 170 tokoh dan ahli yang terdiri dari peneliti dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan asosiasi keilmuan sosial, 62 persen menyatakan ketidakpuasan dalam pemberantasan korupsi, 56 persen responden tidak puas dengan independensi penegak hukum. 52 persen merasa tidak puas dengan kebebasan berpendapat. Kemudian 48 persen merasa tak puas dengan kualitas kebijakan. Kemudian 36 persen lainnya merasa tidak puas dengan aspek penegakkan hukum lainnya.

Beberapa catatan kritis terhadap pemerintah terkait dengan penegakan hukum misalnya proses pembubaran HTI dan FPI tanpa didahului proses pengadilan, kasus pembunuhan (*unlawful killing*) aparat kepolisian terhadap enam anggota FPI, pelemahan KPK melalui mekanisme perundangan, UU ITE yang menjadi alas hukum penangkapan tokoh-tokoh yang kritis dan dianggap anti pemerintah, Kasus Harun Masiku yang tak kunjung menemui titik terang, hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang melibatkan oknum kejaksaan dan kepolisian, Korupsi Tanjung Balai yang melibatkan KPK, Korupsi Bansos yang melibatkan Menteri Sosial serta disinyalir melibatkan para petinggi partai penguasa, dan kasus lainnya yang mengkonfirmasi tesis Mahfud MD bahwa korupsi di Tanah Air semakin meluas setelah reformasi bergulir. Sebelum reformasi tindak korupsi terkonsentrasi di lingkaran penguasa, berbeda dengan fakta bahwa saat ini tindak kejahatan koruptor telah menjalar ke semua lini, horizontal maupun vertikal (Kompas.com, 2021b).

Problematika ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum dan kualitas demokrasi sebagaimana diuraikan tersebut, memicu konsolidasi posisi dalam menghimpun kekuatan menuju pilpres 2024. Sebagaimana Jokowi yang merupakan aktor kunci kemenangan PDIP pada dua pemilu sebelumnya pada 2014 dan 2019 secara konstitusional tidak dapat maju kembali sebagai capres pada 2024, maka semua parpol atau koalisi parpol memiliki kans untuk mengusung capres dengan bekal 20 persen kursi DPR atau 25% suara sah. Jika ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) tersebut tidak dibatalkan MK, maka peta koalisi dan konfigurasi elektoral parpol memungkinkan munculnya satu sampai tiga pasang capres-cawapres. Diantara wacana koalisi yang mengemuka adalah usulan poros partai Islam yang mulai menggemakan pasca pertemuan

presiden PKS dan ketua umum PPP pada 14 April 2021 dilanjutkan bersama ketua umum PKB pada 28 April 2021. Namun demikian, konstituen parpol Islam di tanah air berbeda sikap dan pandangan terhadap wacana poros Islam. Berkaca pada pernyataan sikap para elit, parpol Islam terbagi ke dalam tiga suara; mendukung, menolak dan skeptis terhadap perlu atau tidaknya parpol Islam berkoalisi dalam mengusung kandidat capres dan cawapres pada pemilu 2024.

Penelitian terdahulu mengenai wacana poros Islam telah dilakukan diantaranya oleh Esty Ekawati, peneliti LIPI, pada 2015, paper berjudul “Koalisi Partai Islam di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014” menyimpulkan bahwa koalisi parpol Islam tidak terjadi pada pilpres 2014 disebabkan tiga faktor, yaitu perbedaan sistem pemilihan presiden secara langsung pada 2014 dibandingkan dengan pilpres pada 1999 melalui mekanisme Sidang Istimewa MPR, kalkulasi politik berbasis pragmatisme dan distribusi kekuasaan, serta tidak adanya figur yang dapat mempersatukan ummat. Penelitian lainnya yang sejenis dilakukan M. Nur Rofiq Addiansyah dari IAIN Kudus pada tahun 2019. Dalam makalahnya berjudul “Koalisi Partai Politik Islam pada Pilpres 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis” Addiansyah menyimpulkan bahwa aspek ideologis tidak menjadi faktor penentu dalam konfigurasi koalisi yang sangat sarat dengan pragmatisme politik.

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, peneliti mencoba untuk menyoroti sikap dan persepsi elit parpol Islam terhadap wacana poros Islam sebagai suatu politik identitas, dan mendiskusikan kemungkinan poros Islam sebagai lokomotif suara oposisi menuju pilpres 2024. Penelitian ini berfokus pada nalar (*rationale*) politik para tokoh ditinjau dari perspektif politik identitas dan teori koalisi partai politik Lijphart dan Riker untuk menjawab apakah poros Islam dapat dilihat sebagai perjuangan politik identitas? apakah politik identitas tersebut berorientasi pada tujuan ideologis partai atau sebatas kepentingan (pragmatisme) politik? Di samping itu, apakah poros Islam pada pilpres 2024 merupakan sebuah penggalangan suara oposisi yang memosisikan Islam sebagai lokomotif terhadap suara-suara kritis yang selama ini tidak didengarkan oleh pemerintah?

Penelitian ini merupakan studi dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Objek kajian berupa literatur; pustaka, ebook, jurnal ilmiah, rilis hasil survei, artikel prosiding konferensi, serta artikel jurnalistik mengenai wacana poros Islam ditinjau dari Teori Politik Identitas Barth, Haller dan Punsher dan Teori Koalisi Partai Politik Lijphart dan Riker. Penelaahan terfokus pada nalar (*rationale*) elit parpol Islam sebagaimana tampak pada wacana poros Islam yang berkembang. Penelitian ini mencoba untuk menjawab apakah poros Islam dapat dilihat sebagai perjuangan politik identitas? apakah politik identitas tersebut berorientasi pada tujuan ideologis partai atau sebatas kepentingan (pragmatisme) politik? Kemudian, apakah poros Islam pada pilpres 2024 dapat juga dilihat sebagai upaya penggalangan suara oposisi dengan memosisikan Islam politik sebagai penghimpun suara-suara kritis yang selama ini terkesan diabaikan?

Pembahasan (discussion)

Identitas dan Politik Identitas

Identitas merupakan pengakuan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan entitas yang ditandai dengan keterlibatannya dalam satu kelompok atau golongan tertentu, menurut (Suparlan: 2004 hal. 25). Identitas sosial misalnya memosisikan individu di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi individu di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa memiliki (*sense of belonging*) sekaligus menandai posisi subjektif yang lain di dalam suatu perbedaan (*sense of otherness*) (Harahap, 2014).

Identitas, menurut Frederik Barth, memiliki dua aspek, yaitu perbedaan yang ditonjolkan yang kemudian menjadi marka antara “kami” dan mereka –selanjutnya disebut aspek bentuk atau form- dan aspek kognitif, afektif dan dalam banyak kasus aspek fisik atau jasmani yang dipredikatkan terhadap suatu kelompok –selanjutnya disebut aspek isi atau konten. Identitas tidak hanya dikonstruksi di atas konten kognitif, atau semata-mata membedakan antara “kami” dari “mereka. Untuk memahami identitas seseorang dan suatu kelompok, diperlukan analisis mengenai saling keterpengaruh (*mutual influence*) antara aspek bentuk- misalnya pengakuan diri- dan aspek isi yang menjadi batasan-batasan pembeda (Schafer, 2014).

Politik identitas sendiri merupakan penjabaran dan pengorganisasian dari identitas politik warga negara berkaitan dengan orientasi politik yang dianut. Politik identitas, dalam perspektif historis lahir sebagai upaya pemulihan hak atau pencarian keadilan dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Haller dan Punsher mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang berfokus pada perbedaan (*difference*) sebagai arus kategori sosial-politik. Gerakan demikian muncul sebagai konsekuensi atas kegagalan narasi besar, seperti ide mengenai kebebasan dan toleransi. Akibatnya politik diferensial menjadi penamaan baru dari politik identitas; rasisme, feminisme hingga konflik berbasis etnis. Termin politik identitas, menurut Syafii Ma'arif mulai dikenal sejak 1960 di AS yang saat itu dihadapkan pada praktik penindasan yang dilakukan oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Diskriminasi rasial, khususnya terhadap warga kulit hitam dan etnis hispanik, serta hegemoni kapitalis yang hanya memihak para pemodal yang umumnya dikuasai golongan putih tertentu (Maarif & Dkk, 2010). Berkaca pada latar belakang eksistensinya, politik identitas merupakan upaya membangun kesadaran golongan untuk bangkit memperjuangkan hak-hak yang dirampas dan berjuang memperoleh keadilan. Partai politik, yang menjadi objek pada penelitian ini dapat dipahami sebagai wadah atau sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk mewujudkan keinginan untuk mengisisuatu jabatan politik tertentu (Ekawati, 2015)..

Partai Politik

Neumann mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif melibatkan pelaku-pelaku politik yang berupaya menguasai pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapakeompok lain yang mempunyai pandangan berbeda (Budiarjo, 2008). Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum guna menempatkan kadernya untuk mengisi suatu jabatan publik (Sartori, 2005). Adapun partai politik Islam, sebagaimana diuraikan Rido dan Romli, dapat dipahami dalam tiga

kategori. Pertama, partai Islam memiliki dasar ideologi atau berasaskan Islam. Kedua, partai Islam merupakan partai yang memiliki dasar ideologis Islam dan Pancasila. Ketiga, partai Islam merupakan partai yang berasaskan Pancasila namun memiliki basis massa Islam (Addiansyah, 2019).

Koalisi Partai Politik

Konsep ketiga yang menjadi objek kajian dalam penelitian merupakan koalisi politik. koalisi dimaknai sebagai aktivitas politik yang lazim terjadi pada sistem multipartai. Koalisi politik umumnya terjalin dikarenakan tiga alasan. Pertama, tuntutan suara elektoral yang tak dapat dipenuhi oleh hanya satu parpol, sebagai pra-syarat kandikasi capres-cawapres. Kedua, ikatan atau persamaan ideologis, orientasi politik atau kesamaan persepsi dalam menyikapi suatu keadaan atau kebijakan. Ketiga, pemilu multipartai mengisyaratkan adanya pola politik posisi kontra oposisi, sebagai mekanisme *check and balance*, sehingga koalisi politik tidak bisa dihindarkan (Ekawati, 2015). Terdapat enam teori koalisi, sebagaimana dipopulerkan Lijphart dan menjadi landasan teoretis pada analisis poros Islam dalam penelitian ini. Pertama, teori *Minimal Winning Coalition* (MWC) yang diperkenalkan oleh William H. Riker dengan asumsi intinya bahwa berbekal koalisi yang ramping, sekadar memenuhi syarat kemenangan elektoral, maka partai politik dapat memaksimalkan kekuasaan pada kursi kabinet. Kedua, teori *Minimum Size Coalition* (MSC) yang sebangun dengan asumsi MWC dengan menggenapi kesimpulan logis, yaitu jika parpol hendak mengesampingkan mitra yang tidak dibutuhkan guna memaksimalkan kekuasaan eksekutif, begitupun penguasaan kursi parlemen cukup dengan 50+1 kursi agar memudahkan pengambilan suatu kebijakan. Ketiga, koalisi dengan partai yang lebih kecil secara elektoral guna memaksimalkan posisi tawar (*bargaining position*). Keempat, teori *Minimal Range Coalition* (MRC) dengan asumsi dasar bahwa akan lebih mudah membentuk dan mempertahankan koalisi dengan partai-partai yang memiliki kesamaan pandangan dan preferensi kebijakan yang serupa. Kelima, *Minimal Connected Winning Coalition* (MCWC) yang salah satunya dikembangkan oleh Robert Axelroid. Asumsi inti dari MCWC bahwa koalisi terjalin atas kedekatan antar partai, bahwa pertama-tama koalisi akan terjadi dengan “tetangga” terdekat parpol dan akan menjalar sehingga terbentuk koalisi mayoritas. Keenam, koalisi berbasis kebijakan (*Policy-viable coalition*) dengan asumsi dasar bahwa parpol lebih mengutamakan program kebijakan daripada memperebutkan kekuasaan eksekutif. Bahwa kekuasaan sesungguhnya berada di ranah legislatif, di mana berbagai kebijakan dibuat untuk kemudian dilaksanakan oleh kabinet. (Lijphart: 1999 hal. 95).

Pragmatisme Politik

Konsep berikut yang menjadi objek kajian adalah pragmatisme politik yang menjadi benalu dalam proses koalisi dan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa seluruh partai politik pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama, yaitu memelihara eksistensi mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu jalan yang ditempuh sebagaimana dijelaskan Katz dan Mair adalah dengan praktik politik kartel, yakni partaipolitik menjadi agen negara dan menggunakan sumber daya milik negara untuk memenuhi kepentingan kolektif partai dengan melepaskan berbagai perbedaan ideologis mereka demi kepentingan tertentu (Katz & Mair, 1995).

Berpijak pada teori identitas, politik identitas, teori koalisi dan pragmatisme politik tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis sikap elit parpol Islam terhadap wacana poros Islam sebagai politik identitas yang dimaknai sebagai perjuangan ideologis, kepentingan pragmatis atau sebagai upaya penggalangan kekuatan oposisi menuju pemilu dan pilpres 2024.

Sikap dan Pernyataan Elit terhadap Wacana Poros Islam



Foto. 1. Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) berdiskusi dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kanan) pada rangkaian Silaturahmi Kebangsaan di Kantor Pusat DPP PKS di Jl Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu 14 April 2021. Sumber: republika.id

Wacana koalisi poros partai Islam menuju pemilu 2024 mulai mengemuka sejak April 2021.

Pada Rabu, 14 April 2021, pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertandang ke kantor pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan, guna menjalin silaturahmi kebangsaan dan membahas berbagai isu, diantaranya terkait kerjasama parlemen dan Pemilu/Pilpres 2024. Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menuturkan salah satu pembahasan antar pimpinan partai adalah kesamaan keduanya sebagai partai Islam. Aboe menyinggung kemungkinan terjalinnya koalisi atau poros parpol Islam. "Itu (membentuk poros partai Islam, pen) ide bagus. Jadi, PKS prinsipnya partai yang visinya rahmatan lil alamin", "Penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau tiga tahun, sangat memungkinkan (poros Islam)," jelas Aboe di Markas DPP PKS (Republika, 2021a).



Foto 2. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) berdiskusi bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat melakukan Silaturahmi Kebangsaan pada Rabu 28 April 2021 di Kantor DPP PKB, Jakarta. Sumber: www.kompas.com

Senada dengan optimisme Aboe, Ketua DPP PPP, Dony Ahmad Munir melihat peluang dan harapan supaya partai-partai Islam dapat bersinergi dan membentuk poroskoalisi. PPP berupaya untuk membuka kemungkinan terjalinnya koalisi tersebut. Dony memandang perlunya ikhtiar, komunikasi dan koordinasi diantara parpol Islam yang ada. "Memang ada harapan umat Islam menginginkan partai-partai Islam bersatu. Harapan ini tentunya harus kami sambut dengan mengikhtiar, berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai Islam yang ada," tutur Dony pada kegiatan rilis survei Puspoll Indonesia mengenai wacana poros Islam pada Minggu, 23 Mei 2021 (tempo.com, 2021).

Wacana poros koalisi parpol Islam semakin mengemuka pasca silaturahmi kebangsaan PKS dan PKB yang dilakukan 2 pekan berselang, pada Rabu 28 April 2021 di Kantor DPP Jl Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat. Meski pertemuan tersebut tidak membahas secara eksplisit mengenai peluang koalisi menuju pilpres 2024, namun Ketua Umum PKB banyak menyinggung kerjasama produktif antara PKB dan PKS baik di dalam maupun diluar parlemen. "Selain di parlemen, PKB dan PKS bisa membantu membangkitkan semangat keumatan di berbagai aspek. PKB dan PKS dalam hal ini banyak memiliki titik kesamaan," tutur Cak Imin (Kompas.com, 2021a). Sebelumnya, merespon wacana poros Islam yang digagas PKS dan PPP, Waketum PKB Jaziul Fawaid menyambut baik rencana koalisi tersebut. "Kami menyambut baik wacana itu untuk membangun poros kekuatan demokrasi dengan menawarkan ide program keumatan yang segar dan tidak berhenti pada sebatas wacana," urai Fawaid pada Kamis 15 April 2021 (Detik.com, 2021b).

Dukungan atas wacana poros Islam bergulir dari parpol Islam non parlemen dan parpol yang baru terbentuk yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), partai Masyumi (Reborn) dan partai Ummat. Meskipun dukungan dari partai Ummat bersifat kritis dan didasari skeptisme. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB menyambut positif gagasan mengenai poros atau kerjasama koalisi parpol Islam. Lebih jauh, Yusril menyatakan kesiapsediaan PBB untuk memfasilitasi terwujudnya ide mengenai penghimpunan kekuatan politik Islam dimaksud. "Saya selalu menyambut baik setiap gagasan dan niat untuk menyatukan partai-partai Islam, baik dalam bentuk koalisi, aliansi bahkan peleburan partai-partai Islam menjadi satu kekuatan," kata Yusril pada Kamis 15 April 2021 (Suara.com, 2021). Gagasan mengenai penyatuan partai Islam, menurut Yusril, kerap kali bukan terhambat oleh masalah prinsipil seperti ideologi atau prinsip perjuangan, tetapi oleh aspek pragmatisme atau kepentingan di lapangan. Yusril termasuk ke dalam jajaran elit yang antusias terhadap ide poros Islam. "Saya menyambut baik pertemuan PKS dan PPP kemarin yang mulai membahas pembentukan poros tengah partai-partai Islam. Pemilu masih tiga tahun lagi. Namun lebih cepat membahas hal di atas akan lebih baik, PBB akan ikut aktif dalam pertemuan-pertemuan lanjutan yang nanti akan diadakan," ungkap Yusril (jawapos, 2021).

Sebangun dengan dukungan PBB, Ketua Umum Partai Masyumi (Reborn), Ahmad Yani menyatakan perlunya sebuah koalisi untuk menampung aspirasi umat Islam. Kesatuan ummat, yang dimanifestasikan salah satunya dengan poros koalisi parpol Islam, maka ide dan gagasan Islam dapat secara efektif diperjuangkan guna mewujudkan kemaslahatan bukan saja untuk ummat Islam, namun juga sebagai solusi problematika yang mendera bangsa Indonesia (Republika, 2021b). Titik tolak dukungan Masyumi (Reborn) berpangkal pada aspirasi ummat, dimana terjadi kemacetan saluran politik hari ini dalam menyalurkan harapan dan suara ummat, ditengah stigmatisasi radikalisme dan fundamentalisme salafi-wahabi yang seringkali dijadikan senjata untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Akibatnya suara kritis ulama seringkali dipersepsi sebagai suatu rongrongan terhadap kekuasaan.

Berpijak pada kondisi faktual parpol Islam yang secara umum kurang menyuarakan aspirasi ummat dan cenderung bungkam terhadap berbagai kebijakan Pemerintah yang dipandang merugikan ummat Islam di Indonesia, seperti kriminalisasi ulama, pembungkaman terhadap suara kritis, penggunaan buzzer dalam penggiringan opini publik, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, pengelolaan dana haji yang dianggap para ahli tidak prudent, pembubaran ormas Islam tanpa proses peradilan, tindakan represif aparat semisal *unlawful killing* terhadap enam anggota FPI, stigmatisasi taliban terhadap pihak-pihak tertentu, dan lain sebagainya, menggiring pada kesimpulan mantan

Waketum Partai Ummat, Agung Mozin bahwa wacana poros Islam pada pemilu 2024 merupakan bentuk kepanikan dan kekhawatiran elit parpol Islam ditinggalkan massa yang selama ini diabaikan. Meski mendukung terbentuknya poros Islam, Mozin meragukan komitmen koalisi benar-benar diorientasikan untuk kemaslahatan ummat (tribunnews.com, 2021). Skeptisime dan catatan kritis Partai Ummat perlu diketengahkan sebagai jawaban apakah wacana poros Islam, juga mencakup tawaran ide atau gagasan alternatif terhadap masalah laten yang dihadapi negeri ini, atau sekadar bentuk *office-seeking* atau pencapaian kekuasaan semata.

Di kutub yang bersebrangan, wacana poros koalisi parpol Islam ditolak oleh dua parpol Islam lainnya, yaitu PAN dan Partai Gelora Indonesia. Penolakan PAN terhadap poros Islam didasarkan pada keterbelahan (polarisasi) masyarakat yang masih kentara pasca Pilpres 2014, pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 yang sangat kental dengan benturan politik identitas. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan –lebih populer disebut Zulhas- menilai bahwa wacana poros Islam bersifat kontraproduktif terhadap upaya rekonsiliasi nasional guna memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa dan negara. Meski elit telah berkonsiliasi, sebagaimana Prabowo-Sandi telah menjadi bagian dari kabinet Jokowi, namun rakyat masih terbelah. Sehingga Zulhas lebih mengarus-utamakan politik gagasan yang bersifat inklusif di atas politik identitas, guna mencegah retaknya kohesivitas sosial di tanah air. Zulhas memimpin upaya PAN untuk memperjuangkan dan memperkuat politik gagasan yang mengedepankan konsep dan program (Jawapos, 2021).

Gagasan serupa dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, yang melihat pembentukan poros Islam berpotensi memperlebar polarisasi politik identitas di tengah masyarakat pasca-Pilpres 2019. Alih-alih hadir sebagai solusi untuk mempersatukan masyarakat, poros Islam berpotensi menciptakan kelompok-kelompok kecil di masyarakat. Poros Islam pada akhirnya memosisikan umat secara vis-a-vis dengan pihak lainnya secara konfrontatif di dalam rumah besar bernama Indonesia. Anis justru ingin berkaca pada sejarah, bahwa diperlukan sebuah narasi besaryang dapat meleburkan kotak-kotak identitas, seperti parpol Islam dan non Islam yang dahulu seluruhnya menyatu dalam gagasan perjuangan kemerdekaan. Pendekatan serupa dibutuhkan saat ini, dibutuhkan narasi baru yang mampu membawa menuju arah baru Indonesia (mediaindonesia, 2021).

Terkait dengan sikap PAN dan Gelora terhadap wacana poros Islam, menjadikan politik identitas dan polarisasi masyarakat sebagai dasar penolakan kerjasama koalisi parpol Islam perlu ditinjau ulang mengingat ketiga realitas tersebut merupakan fakta yang tidak sepenuhnya terhubung secara linear, sebagaimana ketiganya memiliki latar belakang dan ruang objektif yang juga berbeda. Keengganan mewujudkan poros Islam karena kekhawatiran menimbulkan masalah dalam kehidupan berbangsa, menurut Azyumardi Azra merupakan sebuah pandangan yang berlebihan. Pengusung poros Islam saat ini, menurut Guru Besar UIN Hidayatullah Jakarta tersebut hanya dua yaitu PKS dan PPP. Ia melihat dua Partai Islam ini, baik PKS maupun PPP sebagai partai yang baik dan bukan ancaman bagi bangsa. Koalisi berbasis Islam atau Pancasila, menurut Azrasama-sama berpeluang untuk bisa menang di Pemilu, tergantung kemampuan mengkapitalsiasi berbagai problematika yang dihadapi masyarakat."Banyak sekali masalah ekonomi, sosial, disrupsi tingkat lokal, nasional dan global. Jadi tdak bisa hanya bicara pada ideologi saja. Apakah Islam atau Pancasila," ungkapnya.

Rasional Dukungan terhadap Wacana Poros Islam

Pertama-tama, wacana poros Islam yang awalnya digulirkan elit PKS dan PPP dilatari fakta politik bahwa Jokowi yang merupakan faktor kunci kemenangan PDIP pada dua hajatan pilpres 2014 dan 2019, secara konstitusional tidak dapat maju kembali sebagai capres pada pemilu 2024. Disamping itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan, khususnya Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dirilis Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 5 Mei 2021, berada pada kisaran angka 63,1 persen, dengan penilaian kinerja presiden dan wakil presiden mencapai angka 6 dari skala 1-10. Angka tersebut turun signifikan dari tingkat kepuasan publik periode pertama pemerintahan Jokowi sebesar 77,2 persen (data Alvara Research Center per Januari 2015). Penurunan tingkat kepuasan secara signifikandiantaranya akibat dari berbagai kebijakan yang tidak populer dan menyulut kontroversi di tengah masyarakat, seperti revisi UU KPK yang berujung pada pelemahan lembaga anti rasuah tersebut, pengesahan UU ITE yang berujung pada pengebirian terhadap suara kritis, peningkatan utang pemerintah yang melonjak tinggi, tindak kejahatan korupsi yang melibatkan banyak pejabat publik, kriminalisasi ulama, pembubaran ormas tanpa proses peradilan, hingga wacana pajak sembako, pendidikan dan persalinan. Berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak terhadap rakyat dan ummat tersebut memicu konsolidasi suara oposisi atau pihak yang bersebrangan pandangan dengan pemerintah, tak terkecuali partai-partai Islam, untuk menghimpun kekuatan demi terwujudnya harapan baru dan perubahan ke arah yang lebih baik.

Kedua, wacana poros Islam mendapatkan respon positif dari elit partai-partai Islam (PKS, PPP, PKB, PBB, Masyumi (Reborn) dan Partai Ummat) yang tengah berupaya memperluas dukungan elektoral, mempertahankan basis massa dan meningkatkan *bargaining position*-nya di tengah persaingan parpol Islam yang kian bertambah ketat. Bahwa raihan suara elektoral partai Islam sejak pemilu 2004 hingga 2019 berkisar pada angka 30 persen, dengan konfigurasi jumlah parpol Islam dan upaya peningkatanambang batas parlemen (*Parlementary Threshold*) di angka 7 persen sebagaimana usulan Golkar dan Nasdem, gagasan poros Islam dalam bentuk paling ekstrem, yaitu peleburan partai-partai Islam menjadi satu entitas menjadi langkah imperatif yang bukan saja berorientasi pada kemenangan kekuasaan (*office seeking*), tapi sebagai upaya perjuangan ideologis dalam mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Secara konseptual, gagasan poros Islam dalam berbagai bentuknya, merupakan langkah ideal untuk ditempuh. Kesamaan ideologi, sebagaimana diungkapkan Abraham De Swaan, merupakan faktor kunci keberhasilan koalisi. Meraih kekuasaan di pemerintahan bukanlah tujuan akhir dari politisi partai, namun merupakan sarana untuk menjalankan program dan kebijakan yang didasarkan pada ideologi. (Ambardi; Ekawati: 2015 hal.20).

Ketiga, partai-partai Islam, merujuk pada teori Minimal Range Coalition (MRC) akan mudah menjalin koalisi jika mampu meredam ego politik dengan mengedepankan kesamaan pandangan dan menunjukkan preferensi politik yang didasari sikap simpatik dan saling pengertian. Meski berbeda posisi dalam pemerintahan dan menjadi rumah bagi basis massa yang berbeda, PKS dan PKB misalnya memiliki banyak kesamaan, diantaranya sama-sama mengusung nilai-nilai moderasi Islam, sama-sama produk reformasi, dan sama-sama bergerak dalam ruang politik Islam dalam bingkai keummatan dan keindonesiaan. “PKB dan PKS bisa membantu membangkitkan semangat keumatan di berbagai aspek. PKB dan PKS dalam hal ini banyak memiliki titik kesamaan” tutur Cak Imin pada silaturahmi kebangsaan dengan PKS pada 28 April 2021.

Keempat, koalisi partai politik, berkaca pada teori Minimal Connected Winning Coalition (MCWC) Axelroid, akan mudah terjadi diantara partai dengan platform ideologis, kedekatan preferensi politik dan kesamaan pandangan terhadap kebijakan. Koalisi dimulai dari partai “tetangga” terdekat dan akan menjalar hingga tercipta koalisi mayoritas. Wajar jika PKS (8,21 persen suara nasional atau 50 kursi DPR) dan PPP (4,52 persen suara nasional atau 19 kursi DPR) bergerak sebagai inisiator koalisi dan mendapat respons positif dari mayoritas elit parpol Islam lainnya. Namun demikian, ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau minimal 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya, mengharuskan penjajakan koalisi dilakukan secara serius. PKB sebagai partai Islam parlementer terbesar (dengan 9,69 persen suara nasional atau 58 kursi DPR) sangat menentukan eksistensi koalisi. Sehingga PKB sesungguhnya memiliki posisi tawar (*bargaining position*) tertinggi misalnya dalam upaya kandidasi capres-cawapres dalam koalisi yang terbangun. Meskipun demikian, idealnya PKB dapat meredam ego politiknya jika ternyata kader dari parpol lain, atau figur non partisan lebih unggul dalam survei yang dilakukan secara objektif. Figur calon presiden merupakan faktor dominan dalam perpolitikan di Indonesia. Kekalahan parpol Islam sejak reformasi bergulir salah satunya disebabkan tidak adanya figur pemersatu umat yang dapat menyaingi popularitas tokoh dari partai-partai non agama. Sehubungan dengan realitas tersebut, hasil berbagai riset yang mengunggulkan Anies R Baswedan yang konsisten sebagai satu dari tiga capres pilihan rakyat, dapat dilihat sebagai peluang bagi parpol Islam untuk menghimpun kekuatan guna meng-endorse tokoh yang dipersepsi sebagai personifikasi oposisi pemerintah petahana dan memiliki kedekatan dengan umat tersebut.

Hasil Survei Capres 2024 Berbagai Lembaga Survei

Lembaga Survei	Anies Baswedan	Prabowo Subianto	Ganjar Pranowo	Sandiaga Uno	Ridwan Kamil	Agus H Yudhoyono
Akar Rumpit Strategic Consulting	17.01	14.31	11.25	6.87	5.86	5.55
IP3ES	12.80	16.40	9.60	6.20	7.50	8.80
Litbang Kompas	10.00	16.40	7.30	3.70	3.40	3.30
Kedai Kopi	12.50	24.50	16.00	6.60	13.30	1.40
Indonesia Political Opinion	15.80	5.70	12.60	9.50	7.90	7.10

Sumber: www.tribunnews.com

Tabel 2. Hasil Survei Capres Pilihan dari Berbagai Lembaga Survei

Kelima, keengganan mewujudkan poros Islam karena kekhawatiran menimbulkan suatu permasalahan merupakan sebuah pandangan yang keliru dan tidak berdasar. Justru politisi Islam harus dapat meyakinkan publik Indonesia yang plural bahwa eksistensi poros Islam mampu menawarkan solusi alternatif atas berbagai problematika yang dihadapi masyarakat. Koalisi berbasis Islam atau Pancasila sama-sama memiliki peluang untuk menang, bergantung pada kemampuan mengkapitalsiasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemahaman yang utuh atas politik identitas sebagai sebuah perjuangan memperoleh hak dan keadilan, serta perjuangan melawan diskriminasi sosial memberikan pemahaman bahwa poros Islam sebagai suatu politik identitas merupakan manifestasi nilai-nilai pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu sebagai bangsa Indonesia, berdemokrasi atas dasar musyawarah-mufakat, demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun terkait dengan fenomena polarisasi masyarakat Indonesia, tidak bijak jika direspon dengan keengganan untuk mengekspresikan politik Islam, termasuk menolak gagasan koalisi parpol

Islam. Bahwa dalam perjalanan historis, pemilu 1955 dikenal sebagai pemilu paling jujur yang pernah diselenggarakan oleh bangsa Indonesia. Hasil pemilu, sebagaimana tampak pada tabel 3 telah menggambarkan polarisasi masyarakat ke dalam sekurangnya lima golongan; Nasionalis Sekuler, Islam, Komunis-Sosialis, Kristen-Katolik dan komunitas budaya serta agama lainnya. Realitas sosial tersebut merupakan keniscayaan yang akan terus lestari di bumi Indonesia dan bukan alasan untuk enggan mengekspresikan Islam politik, sebagai bagian dari solusi yang menjadi warna dari kebhinekaan Indonesia.

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR RI

No	Nama Partai	Abreviasi	Suara	Persen	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia	PNI	8,434,653	22.32	57
2	Majelis Syuro Muslimin Indoensia	Masyumi	7,903,886	20.92	57
3	Nahdlatul Ulama	NU	6,955,141	18.41	45
4	Partai Komunis Indonesia	PKI	6,179,914	16.36	39
5	Partai Syarikat Islam Indonesia	PSII	1,091,160	2.89	8
6	Partai Kristen Indonesia	Parkindo	1,003,326	2.66	8
7	Partai Katolik	PKI	770,740	2.04	6
8	Partai Sosialis Indonesia	PSI	753,191	1.99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	IPKI	541,306	1.43	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah	Perti	483,014	1.28	4
11	Partai Rakyat Nasional	PRN	242,125	0.64	2
12	Partai Buruh	PB	224,167	0.59	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila	GPPS	219,985	0.58	2
14	Partai Rakyat Indonesia	PRI	206,161	0.55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI	P3RI	200,419	0.53	2
16	Musyawaharah Rakyat Banyak	Murba	199,588	0.53	2
17	Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia	Baperki	178,887	0.47	1
18	Persatuan Indonesia Raya Wongsonegoro	PIR Wongsonegoro	178,481	0.47	1
19	Gerakan Rakyat Indonesia	Gerinda	154,792	0.41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia	Permai	149,287	0.40	1
21	Persatuan Daya	PD	146,054	0.39	1
22	Persatuan Indonesia Raya Hazairin	PIR Hazairin	114,644	0.30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam	PPTI	85,131	0.22	1
24	Angkatan Kemenangan Umat Islam	AKUI	81,454	0.21	1
25	Persatuan Rakyat Desa	PRD	77,919	0.21	1
26	Partai Republik Indonesia Merdeka	PRIM	72,523	0.19	1
27	Angkatan Komunis Muda	Acoma	64,514	0.17	1
28	R. Soedjono Prawirisoeardoso	-	53,306	0.14	1
29	Lain-lain	-	1,022,433	2.71	-
		Jumlah	37,788,201	100	257

Sumber: www.kpud-medankota.go.id

Tabel 3. Hasil Pemilu DPR RI tahun 1955

Rasional Penolakan terhadap Gagasan Poros Islam

Bagi sebagian kalangan, wacana koalisi poros partai Islam terkesan utopis dan tidak menjawab tantangan Indonesia saat ini. Penolakan terhadap poros Islam diantaranya didasarkan pada keterbelahan (polarisasi) masyarakat yang masih kentara pasca Pilpres 2014, pilkada DKI

2017 dan Pilpres 2019 yang sarat dengan benturan politik identitas. Beranjak dari fakta tersebut, PAN misalnya lebih memilih politik gagasan yang bersifat inklusif di atas politik identitas. Partai ber lambang matahari tersebut memperjuangkan dan memperkuat politik gagasan yang mengedepankan konsep dan program.

Kedua, poros Islam dipandang bukan sebagai solusi untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang plural, namun wacana tersebut berpotensi menciptakan kelompok-kelompok kecil di masyarakat. Poros Islam dalam praktiknya akan memosisikan umat secara konfrontatif dengan pihak lain di dalam rumah besar Indonesia.

Ketiga, alih-alih membentuk poros Islam, jika berkaca pada sejarah, bahwa diperlukan sebuah narasi yang dapat mempersatukan, baik parpol Islam maupun non Islam, seperti gagasan perjuangan kemerdekaan yang mampu melebur segala sekat identitas dan perbedaan. Pendekatan serupa dibutuhkan hari ini, diperlukan suatu narasi baru yang mampu menciptakan kohesivitas sosial menuju arah baru Indonesia.

Keempat, terdapat perbedaan prinsipil antara politik identitas sebagai dalam tinjauan historis di Amerika Serikat sebagai perjuangan kaum minoritas memperoleh kesetaraan, dengan praktik politik identitas di Indonesia hari ini. Bahwa politik identitas di Indonesia, sebagaimana diuraikan Musdah Mulia, dilakukan oleh kelompok mayoritas dengan maksud menyingkirkan minoritas yang dianggap menyimpang. Politik identitas Islam, khususnya yang disokong dan ditunjukkan golongan fundamentalis cenderung melahirkan tiga jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik seperti pengrusakan dan *sweeping*, kekerasan simbolik seperti propaganda lisan dan tulisan yang menyudutkan komunitas atau keyakinan tertentu. Ketiga kekerasan struktural yang melibatkan aparat kekuasaan melalui mekanisme hukum dan sebagainya (Maarif & Dkk, 2010).

Kelima, kajian yang dilakukan oleh Fitri Ramdhani Harahap (2014) yang berjudul “Politik Identitas Berbasis Agama” menyimpulkan bahwa kemajemukan identitas di Indonesia terancam oleh politik identitas yang mengarah kepada penghancuran integritas kehidupan beragama yang telah lama dipertahankan. Politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membentuk dominasi arus besar untuk sebuah kepentingan kelompok yang memeras dan menyingkirkan kelompok lawan atau kelompok minoritas. Politik identitas yang mendominasi Indonesia saat ini adalah politik identitas keagamaan yang menghadirkan eksklusivisme kelompok mayoritas muslim di Indonesia. Hal ini juga diperkeruh dengan dinamika politik Indonesia yang cenderung menggunakan isu-isu agama untuk mempertahankan kekuasaan politik dan cenderung menimbulkan konflik-konflik sosial keagamaan.

Poros Islam sebagai Penghimpun Aspirasi Kritis

Ditengarai mandulnya sikap kritis Parlemen terhadap Pemerintah, maka mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Jokowi, khususnya di periode kedua, tidak berjalan secara ideal. Fenomena koalisi yang gemuk, dalam hal ini hampir seluruh parpol menjadi bagian dari pemerintah, menjadikan nyaris seluruh draft Rancangan UU yang disodorkan eksekutif kepada parlemen, dengan mulus menjadi UU tanpa proses dialektika yang objektif dan proporsional. Akibatnya, banyak rancangan perundangan yang dirasakan kurang memberikan keadilan, bahkan diantaranya menyulut konflik sosial, terhenti atau mengalami perbaikan, bukan

karena proses dialogis antara posisi dan oposisi, namun karena kontrol sosial atau pengawasan non parlemen melalui gerakan demonstrasi dan pernyataan sikap organisasi masyarakat, para akademisi, cendekiawan dan tokoh-tokoh publik yang berpengaruh. Rancangan UU yang dikoreksi melalui kontrol sosial tersebut diantaranya RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, UU ITE, UU KPK, UU Minerba dan perundangan lainnya yang dianggap jauh dari keadilan.

Salah satu fenomena sosial yang muncul akibat disfungsi Parlemen adalah munculnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada tanggal 18 Agustus 2020. Tokoh-tokoh yang hadir dalam deklarasi tersebut antara lain mantan ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, politisi Islam Ahmad Yani, MS Kaban, Rochmad Wahab, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, pakar HTN Refly Harun, ekonom Ichsanuddin Noorsy, tokoh komunitas Tiong Hoa Lieus Sungkharisma, aktivis sosial Jumhur Hidayat, mantan ketua KPK Abdullah Hehamahua, pengamat politik Rocky Gerung, putri Bapak Proklamasi Meutia Hatta, pengamat BUMN Said Didu, dan Bapak Reformasi Amien Rais.

Ketua Komite KAMI yang saat ini menjabat Ketua Partai Masyumi (Reborn) Ahmad Yani, menjelaskan bahwa KAMI merupakan gerakan moral dan sosial berbagai elemen dan komponen rakyat Indonesia yang berjuang bagi kedaulatan negara, dan mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam deklarasinya di Tugu Proklamasi pada 18 Agustus 2020, Kami mengajukan delapan tuntutan kepada Pemerintahan Jokowi yaitu (1) penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai UUD 1945 & Pancasila (2) menuntut keseriusan penanggulangan wabah covid-19 demi keselamatan rakyat (3) menuntut keberpihakan pemerintah kepada rakyat daripada kepentingan pengusaha besar dan asing (4) menuntut supremasi hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif (5) menuntut pemberantasan tindak KKN (6) menuntut pemerintah tdk memberi ruang bangkitnya ideologi anti pancasila, serta menghentikan stigmatisasi terhadap kelompok tertentu (7) menuntut untuk mengusut dan mencegah pihak-pihak yang ingin mengubah Dasar Negara Pancasila melalui jalur konstitusi (8) menuntut lembaga-lembaga negara melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Konstituen KAMI yang mencakup para elit parpol Islam serta tokoh-tokoh dengan beragam latar belakang sosial, budaya dan profesi, menunjukkan fenomena bahwa konfigurasi kepartaian dalam sistem pemerintahan Jokowi sangat tidak ideal. Suara PKS dan Demokrat yang timpang dari koalisi partai penguasa yang dominan menjadikan proses dialektika politik, khususnya dalam pembuatan kebijakan menjadi pincang.

Merespon realitas tersebut, KAMI menunjukkan potensi parpol Islam, sebagaimana dicerminkan oleh eksistensi elit-elit parpol Islam didalamnya, untuk dapat berfungsi layaknya lokomotif terhadap suara-suara kritis atau kekuatan oposisi yang sesungguhnya tidak terbatas pada masyarakat muslim saja. Jika saja poros Islam terbentuk, 30 persen suara elektoral dapat digunakan sebagai saluran aspirasi sebagaimana tergambar dari delapan tuntutan KAMI. Poros Islam harus dapat memanfaatkan momentum tren penurunan kepuasan publik terhadap rezim Jokowi dan disfungsi parlemen yang secara telanjang dipertontonkan hari ini, guna meraih kemenangan pada pilpres 2024 dan lebih jauh demi pembuatan kebijakan yang sesuai dengan ideologi yang *rahmatan lil alamin*.

Tantangan Poros Partai Islam

Mewujudkan wacana poros Islam menjadi sebuah gerakan koalisi parpol Islam dihadapkan kepada beberapa tantangan. Pertama, wacana poros partai Islam belum begitu populer; sebagaimana ditunjukkan melalui survei Puspoll Indonesia bahwa hanya 14,8 persen responden pernah mendengar wacana poros Islam, 59,4 persen diantaranya tidak pernah mendengar, dan 25,8 persen lainnya memberikan jawaban. Sehingga, jika para elit serius mewujudkan poros Islam harus dilakukan sekurangnya 2 sampai 1 tahun sebelum pemilu untuk memberikan waktu yang cukup mengkampanyekan poros koalisi, kebijakan dan program yang ditawarkan.

Kedua, partai-partai Islam masih terpecah dalam menentukan figur capres yang dapat dianggap mampu menjadi perekat konstituen muslim dan mungkin juga non muslim yang memiliki latar belakang yang beragam. Preferensi konstituen Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim misalnya mendukung wacana poros Islam dengan Cak Imin sebagai capres yang diusulkan (Detik.com, 2021a).

Pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagaimana rilis Puspoll Indonesia, mayoritas atau sekitar 40,7 persen dan PBB sekitar 66,7 persen mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai capres. Jika kedua tokoh tersebut dapat disinergikan dan mendapat persetujuan dari PPP kemungkinan poros Islam dapat terwujud.

Ketiga, Islam politik yang salah satunya dimanifestasikan dalam bentuk parpol dan poros parpol Islam, sebagaimana diungkapkan Siti Zuhro, peneliti LIPI, tidak mudah. Umat Islam menuntut kualifikasi yang tinggi terhadap bagaimana partai menjalankan nilai-nilai Islam. Thesis Cak Nur Islam Yes, Partai Islam No! misalnya masih mendominasi preferensi publik berkisar 65-70% masyarakat Islam Indonesia lebih memilih partai nasionalis yang dianggap Islami daripada partai-partai Islam yang justru diragukan komitmen keislamannya. Salah satu penyebab preferensi dimaksud terkait dengan kemampuan mengkapitalisasi problematika sosial, termasuk merumuskan kebijakan dan program di lapangan.

Keempat, partai-partai Islam dituntut untuk mampu menjawab beragam problematika melalui program kerja yang dapat dirasakan langsung oleh *grass root*. Ketidakpuasan publik terhadap berbagai kinerja pemerintahan pada sektor ekonomi misalnya harus dapat dijawab dengan solusi bagaimana pemerintah dapat meningkatkan pendapatan sehingga tidak harus mengandalkan utang LN dalam membiayai APBN dan seterusnya. Sehingga, menilai keefektifan poros partai Islam dapat juga dilihat pada kemampuan mereka untuk menawarkan alternatif kebijakan sebagai antitesis program kerja yang selama ini dijalankan Pemerintah. Di tengah ketidakmampuan partai-partai non-agama dalam pemenuhan komitmen dalam kampanye, selain aspek ideologi yang semakin kabur di semua partai politik.

Kelima, predikat Islam dalam wacana poros Islam mengharuskan koalisi yang terbangun mengutamakan ideologi di atas kepentingan politik. Padahal dalam sistem perpolitikan tanah air yang mahal, dibandingkan misalnya dengan Jerman dimana partai sepenuhnya dibiayai negara, menyebabkan fenomena koalisi terkait erat dengan kepentingan partai untuk mempertahankan eksistensinya. Katz dan Mair menyimpulkan bahwa semua partai pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama, yaitu memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka. Kecenderungan itu kemudian dilakukan dengan praktik kartel atau perburuan rente, selanjutnya disebut partai kartel yang memosisikan partai menjadi agen negara dan menggunakan sumber daya milik negara untuk

memenuhi kepentingan kolektif partai dengan menanggalkan berbagai perbedaan ideologis, kebijakan dan program mereka demi kepentingan tertentu. Kasus Luthfi Hasan, Suryadharma Ali, Romahurmuziy dan Imam Nahrawi menjadi dalih bahwa parpol Islam, sebagaimana parpol lainnya lebih bersifat pragmatis daripada ideologis. Bahkan tindak korupsi parpol Islam lebih dibenci publik karena predikat Islam yang suci melekat pada parpol tersebut. Sehingga poros Islam harus mampu melangitkan nilai politik sesuai dengan ideologi yang diusung bukan malah membumikan nilai-nilai langit demi kepentingan pragmatis.

Simpulan

Koalisi parpol Islam saat itu dinamai poros tengah pernah berhasil mengantarkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden, mengalahkan kandidat PDIP yang keluar sebagai pemenang Pemilu tahun 1999. Kesamaan identitas (ideologis) dan kepentingan (pragmatis) menjadi dasar koalisi parpol Islam yang terjalin pada saat itu. Faktanya bahwa di bawah pemerintahan Gus Dur, Indonesia berhasil melalui fase kritis yang rawan konflik sosial. Lebih dari itu, Gus Dur yang didukung koalisi parpol Islam berhasil menjadi *icon* toleransi dan pluralisme beragama di Indonesia. Karena itu, menyoal politik identitas sebagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan menjadi tidak relevan di Indonesia yang secara genealogis ditakdirkan plural. Lebih-lebih seluruh partai politik Islam di Indonesia tak memiliki agenda untuk menambah, mengurangi atau bahkan mengganti Pancasila (dan UUD 1945) sebagai Dasar Negara. Bahwa poros Islam sebagai politik identitas lebih bijak untuk dimaknai sebagai upaya kolektif ummat Islam untuk berkoalisi, dan bersinergi memperjuangkan keadilan sosial melalui sistem politik, alih-alih upaya memperjuangkan formalisasi Islam. Dukungan, penolakan dan skeptisisme elit terhadap wacana poros Islam pada dasarnya merefleksikan perspektif elit dalam memosisikan politik identitas dan Islam politik terhadap peta politik dan sosial hari ini. Sejatinya menolak gagasan koalisi parpol berbasis identitas dengan alasan kebhinekaan, sama halnya dengan mengingkari kebhinekaan itu sendiri. Terlebih, ketika Pemerintah dipandang tidak cukup berhasil merawat Indonesia sebagai “rumah besar” milik bersama, Koalisi Poros Partai Islam dapat menjadi pintu masuk, untuk merajut kembali persatuan Indonesia bersama komponen bangsa lainnya, demi mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Addiansyah, M. (2019). Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2).
- bisnis.tempo. (2021, June 24). Indef Prediksi Warisan Utang Jokowi Capai Rp 10 Ribu Triliun, Bisa Picu Krisis. *Www.bisnistempo.co.id*. www.bisnis.tempo.co/read/1476163/indef-prediksi-warisan-utang-jokowi-capai-rp-10-ribu-triliun-bisa-picu-krisis/full?view=o
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Detik.com. (2021a, April 15). PKB Jatim Siap Gabung Poros Islam, Usulkan Cak Imin Capres 2024. *Www.news.detik.com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5534008/pkb-jatim-siap-gabung-poros-islam-usulkan-cak-imin-capres-2024>
- Detik.com. (2021b, April 21). PKB Siap Gabung Poros Partai Islam Gagasan PKS-PPP, Harap Tak Cuma Wacana. *Www.news.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5533157/pkb-siap-gabung-poros-partai-islam-gagasan-pks-ppp-harap-tak-cuma-wacana>
- Dpr.go.id. (2019). *Penegakan Hukum Era Jokowi Dinilai Gagal*. *Www.dpr.go.id*.
- Ekawati, E. (2015). Koalisi Partai Islam Di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1).
- Harahap, F. (2014). Politik Identitas Berbasis Agama. *Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna*.
- Jawapos. (2021, April 16). Rakyat Masih Terbelah, Zulhas Tolak Keras Poros Islam. *Www.jawapos.com*. <https://www.jawapos.com/nasional/16/04/2021/rakyat-masih-terbelah-zulhas-tolak-keras-poros-islam/>.
- jawapos. (2021, April 16). Yusril Dukung Pembentukan Poros Koalisi Partai Islam Jelang Pilpres. *Www.jawapos.com*. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/yusril-dukung-pembentukan-poros-koalisi-partai-islam-jelang-pilpres/>.
- Katz, R., & Mair, P. (1995). *Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*. Sage Publication.
- Kompas.com. (2021a, April 28). Ketum PKB dan Presiden PKS Bertemu, Ini yang Dibahas. *Www.kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/21330791/ketum-pkb-dan-presiden-pks-bertemu-ini-yang-dibahas>.
- Kompas.com. (2021b, May 25). Mahfud MD: Setelah Reformasi Korupsi Makin Meluas, dari Segala Lini. *Www.kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/26/15572521/mahfud-md-setelah-reformasi-korupsi-makin-meluas-dari-segala-lini?page=all>
- Maarif, S., & Dkk. (2010). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. PUSAD Paramadina.
- mediaindonesia. (2021, May 7). Poros Islam Berpotensi Perlebar Polarisasi. *Www.mediaindonesia.com*. <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/403808/poros-islam-berpotensi-perlebar>

polarisasi).

Republika. (2021a, April 15). PKS-PPP Jajaki Poros Islam. *Www.republika.id*.

<https://www.republika.id/posts/15849/pks-ppp-jajaki-poros-islam>

Republika. (2021b, May 24). Masyumi Dukung Poros Islam Terbentuk. *Www.republika.c O.id*.

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qtlovd396>

Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis*. ECPR Press.

Schafer, H. (2014). Identity Politics and the Political Field: A Theoretical Approach to Modelling a 'Field of Identity Politics. *Inter-Amerrican Studies*, 9(1).

Suara.com. (2021, April 16). PKS dan PPP Didorong Bentuk Poros Partai Islam, Yusril dan PBB akan Ikut. *Www.suara.com*. <https://www.suara.com/news/2021/04/16/033000/pks-dan-ppp-didorong-bentuk-poros-partai-islam-yusril-dan-pbb-akan-ikut>.

tempo.com. (2021, May 23). PPP Melihat Ada Harapan Partai-Partai Islam Bersatu Bentuk Poros Koalis. *Www.tempo.com*. [https://nasional.tempo.co/read/1465123/ppp-melihat-ada-harapan-partai-partai-islam-bersatu-bentuk-poros-koalisi/full?view=ok\)s](https://nasional.tempo.co/read/1465123/ppp-melihat-ada-harapan-partai-partai-islam-bersatu-bentuk-poros-koalisi/full?view=ok)s).

tribunnews.com. (2021, April 16). Isu Poros Partai Islam Menguat, Partai Ummat: Ini Bentuk Kepanikan. *Www.tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/16/isu-poros-partai-islam-menguat-partai-ummat-ini-bentuk-kepanikan>